

Kesehatan Mental Dosen ASN Terkait Kesejahteraan dan Tunjangan Kinerja dalam Sorotan Media Digital

Yulita Sirinti Pongtambing¹, Esther Sanda Manapa^{2*}, Jonris Tampubolon³, Nindya Adiasti⁴,Eliyah A. M. Sampetoding⁵¹ Universitas Negeri Makassar^{2,5} Universitas Hasanuddin³ Universitas Timor⁴ Universitas Borneo Tarakanemail korespondensi : ^{2*}esmanapa@gmail.com**INFORMASI ARTIKEL****ABSTRAK****Kata Kunci:**
Kesehatan Mental
Dosen ASN
Tunjangan Kinerja
Kesejahteraan
Analisis Media Digital

Penelitian ini mengkaji persoalan kesejahteraan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kaitannya dengan kesehatan mental dan keterlambatan pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) di bawah lingkup Kemendikisaintek. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis media digital, menggunakan metode analisis framing terhadap pemberitaan daring dari berbagai sumber pada periode 2024–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024 belum menyentuh seluruh lapisan dosen ASN, sehingga menimbulkan ketidakadilan distribusi penghasilan, melemahnya motivasi kerja, dan dampak psikososial terhadap dosen yang terdampak. Selain itu, keterlambatan regulasi lintas kementerian, ketidaktepatan alokasi anggaran, serta absennya kanal komunikasi yang efektif turut memperparah tekanan mental para dosen. Aksi demonstrasi yang dilakukan secara damai oleh ratusan dosen ASN merupakan ekspresi sah atas kekecewaan terhadap sistem birokrasi yang tidak responsif. Studi ini merekomendasikan adanya transparansi alokasi anggaran tahunan, percepatan pembayaran tunggakan Tukin 2020–2024, pembentukan forum komunikasi kebijakan, dan evaluasi berkala berbasis indikator kesejahteraan dan kesehatan mental dosen. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa komitmen konkret dan responsif dari pemerintah, kualitas pendidikan tinggi nasional berisiko tergerus oleh krisis kesejahteraan akademik.

Keywords:
Mental Health
Civil Servant Lecturers
Performance Allowance
Welfare
Digital Media Analysis**ABSTRACT**

This research examines the issue of the welfare of State Civil Apparatus (ASN) lecturers in relation to mental health and the delay in payment of Performance Allowance (Tukin) under the scope of the Ministry of Science and Technology. The analysis was conducted with a qualitative approach based on digital media, using the framing analysis method of online news from various sources in the 2024-2025 period. The results of the study show that the implementation of the policy of Permendikbudristek No. 44 of 2024 has not touched all levels of ASN lecturers, resulting in injustice in income distribution, weakening work motivation, and psychosocial impacts on affected lecturers. In addition, delays in cross-ministerial regulations, inaccurate budget allocations, and the absence of effective communication channels have also exacerbated the lecturers' mental distress. The peaceful demonstration by hundreds of ASN lecturers is a legitimate expression of disappointment with an unresponsive bureaucratic system. This study recommends transparency in annual budget allocations, accelerated payment of Tukin arrears 2020-2024, the establishment of a policy communication forum, and periodic evaluations based on indicators of lecturers' well-being and mental health. The findings confirm that without a concrete and responsive commitment from the government, the quality of national higher education risks being eroded by the academic welfare crisis.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

I. Pendahuluan

Kesehatan mental adalah aspek mendasar dalam kehidupan manusia yang memengaruhi berbagai dimensi penting, seperti kualitas hidup, produktivitas, dan interaksi social [1]. Dalam berbagai literatur psikologi, p16endidikan mental dipahami sebagai kondisi kesejahteraan psikologis di mana individu mampu mengenali dan mengembangkan potensi dirinya, menghadapi tekanan hidup secara adaptif, serta mampu menjalankan aktivitas produktif secara berkelanjutan [2][3]. Lebih dari sekadar ketiadaan gangguan jiwa, 16endidika mental mencerminkan kapasitas individu dalam mempertahankan stabilitas emosional, berpikir rasional, dan berperilaku konstruktif dalam menghadapi tantangan hidup [4].

Kesehatan mental juga mencerminkan kemampuan seseorang untuk membina hubungan interpersonal yang sehat dan berkontribusi positif bagi komunitasnya. Kesadaran diri terhadap kekuatan, kelemahan, dan potensi pribadi merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan mental (resiliensi), yang memungkinkan individu tetap 16tahan dalam tekanan [5]. Di sisi lain, produktivitas kerja dan kontribusi menjadi 16kinerja nyata dari mental yang terjaga yang memperlihatkan bahwa kondisi mental yang sehat tidak hanya berdampak secara personal, tetapi juga turut menopang kesejahteraan individu secara lebih luas [6].

Produktivitas dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk senantiasa memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup p16endidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat [7]. Namun, dalam praktiknya, beban kerja dosen ASN sering kali melebihi standar yang ditetapkan, seperti jumlah SKS pengajaran yang melampaui batas kewajaran, tuntutan publikasi ilmiah yang terus meningkat, hingga keterlibatan dalam berbagai kegiatan institusional. Tekanan kerja yang berlebihan ini berpotensi menimbulkan gangguan keseimbangan antara kehidupan 16endidikan1616 dan pribadi, serta berdampak pada kondisi mental dosen. Jika tidak dikelola secara sistemik dan manusiawi, beban tersebut dapat menurunkan motivasi, performa akademik, dan mental dosen, yang pada akhirnya mengganggu pencapaian tujuan p16endidikan tinggi itu sendiri [8][9].

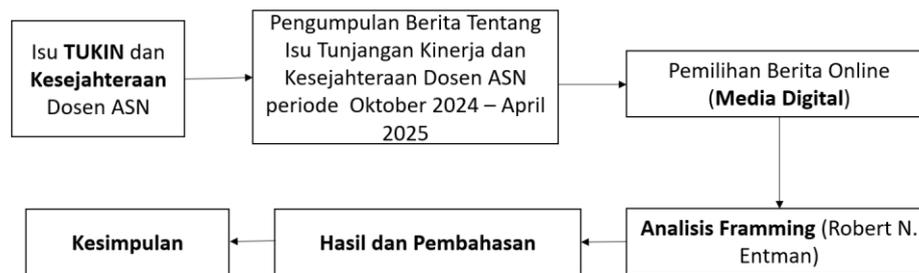
Sejak 2014, hanya dosen ASN di lingkungan Kemdiktisaintek (nama sebelumnya Kemendikbud) tidak menerima Tunjangan Kinerja (Tukin) meskipun skema itu sempat diatur dalam Permendikbud No 49/2020 karena kebutuhan anggaran dan proses birokrasi belum berjalan efektif. Sejak awal 2024, Aliansi Dosen ASN Seluruh Indonesia (ADAKSI) memperjuangkan hak ini secara intensif, yang mencapai puncaknya saat aksi unjuk rasa di Patung Kuda dan Istana Negara pada 3 Februari 2025 [10], dengan tuntutan agar hak tukin yang diabaikan selama lima tahun tersebut segera direalisasikan. Perjuangan ini membuahkan hasil 16yakni Presiden Prabowo Subianto akhirnya menandatangani Perpres Tunjangan Kinerja, menetapkan pemberian tukin efektif sejak 1 Januari 2025 melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2025 yang ditanda tangani pada 11 April 2025 [11].

Kesehatan mental dosen adalah salah satu pilar utama dalam menjaga kualitas 16pendidikan tinggi, karena gangguan psikologis pada dosen tidak hanya mengurangi efektivitas proses pengajaran dan bimbingan, tetapi juga dapat menurunkan produktivitas penelitian yang berdampak luas pada pengembangan ilmu [12].

Penelitian menyatakan bahwa masalah 16 mental pada dosen berpotensi menimbulkan gangguan serius dalam proses pembelajaran, bahkan dapat mempengaruhi kondisi mental mahasiswa [13]. Selain itu, kondisi finansial dosen ASN yang tidak terpenuhi memaksa para Dosen ASN ini mencari sumber penghasilan tambahan seperti mengajar di luar institusi atau pekerjaan sampingan yang menyita waktu dan energi, sehingga menyulitkan konsentrasi untuk riset dan pencapaian akademik berkualitas terhadap mahasiswa. Dengan beban ganda antara tanggung jawab formal tanpa kesejahteraan yang memadai dan kebutuhan untuk mencukupi hidup, dosen ASN menghadapi risiko tekanan mental yang nyata, yang pada gilirannya dapat menggerogoti mutu 16pendidikan dan pengabdian perguruan tinggi secara keseluruhan.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing [14] untuk mengkaji representasi isu 16mental dosen ASN dalam media digital, khususnya dalam konteks kesejahteraan dan tunjangan kinerja. Metode Analisis framing dipilih karena mampu mengungkap bagaimana media membingkai realitas 16endid, termasuk narasi-narasi tentang tekanan psikologis, ketidakadilan tunjangan, dan respons institusi terhadap kondisi dosen. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan analisis isi terhadap berita-berita daring dari media nasional dan platform digital 16endidi selama periode Januari 2024 hingga April 2025.



Gambar 1. Alur Tahapan Penelitian

Teknik analisis menggunakan model Robert Entman yang mencakup empat elemen framing: *problem definition*, *causal interpretation*, *moral evaluation*, dan *treatment recommendation* [15]. Validitas data dijaga melalui *triangulasi sumber* dan *peer debriefing* dengan tim ADAKSI.

III. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan temuan dari analisis terhadap sejumlah berita daring yang menyoroti isu 17endidika mental, kesejahteraan, dan tunjangan kinerja dosen ASN. Tabel 1 merangkum daftar berita yang menjadi objek penelitian, yang diperoleh dari berbagai media digital nasional dan platform institusional selama periode September 2024 hingga April 2025. Berita-berita tersebut dianalisis menggunakan metode framing untuk mengidentifikasi bagaimana media membingkai persoalan mental dosen ASN dalam kaitannya dengan kebijakan tunjangan dan kondisi kerja. Pembahasan hasil akan difokuskan pada pola narasi, elemen framing yang muncul, serta kecenderungan media dalam membangun opini 17endid terhadap isu ini.

Tabel 1. Pengumpulan Berita Online dan Media Digital

No	Judul	Media	Tanggal	Sumber
1.	Meninjau Kesejahteraan Dosen Dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2024	Spk.or.id	24 September 2024	https://spk.or.id/post/view/meninjau-kebijakan-kesejahteraan-dosen-dalam-permendikbudristek-no-44-tahun-2024
2.	Syarat menjadi dosen dan besaran gajinya di Indonesia	antaranews	11 Oktober 2024	https://www.antaranews.com/berita/4390634/syarat-menjadi-dosen-dan-besaran-gajinya-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com
3.	Tuntut Kesejahteraan, Dosen ASN Akan Gelar Aksi Mogok November Mendatang	Jangkau Indonesia	12 Oktober 2024	https://www.jangkauindonesia.com/nasional/55513727298/tuntut-kesejahteraan-dosen-asn-akan-gelar-aksi-mogok-november-mendatang
4.	Dosen Menanti Janji Peningkatan Kesejahteraan	Kompas.id	24 Oktober 2024	https://www.kompas.id/artikel/peningkatan-kesejahteraan-dosen-dinanti
5.	Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta	Tempo	5 November 2024	https://www.tempo.co/politik/dosen-curhat-rendahnya-kesejahteraan-ke-dpr-kami-digaji-di-bawah-rp-3-juta-1164286
6.	Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia Desak Pemerintah Realisasikan Pembayaran Tukin	Tempo.co	4 Januari 2025	https://www.tempo.co/ekonomi/dosen-asn-kemdiktisaintek-seluruh-indonesia-desak-pemerintah-realisasikan-pembayaran-tukin-1189790
7.	Janji Palsu Tunjangan Kinerja, Korban Kesejahteraan Dosen ASN	Tirto.id	7 Januari 2025	https://tirto.id/janji-palsu-tunjangan-kinerja-korban-kesejahteraan-dosen-asn-g7cC
8.	Negara Harus Berikan Kesejahteraan lebih Baik untuk Dosen ASN	Suara Metropolitan	16 Januari 2025	https://suarametropolitan.com/negara-harus-berikan-kesejahteraan-lebih-baik-untuk-dosen-asn/
9.	Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi Pemberian Tukin Dosen ASN Untuk Meningkatkan	Unsulbar News	22 Januari 2025	https://www.unsulbarnews.com/analisis-efisiensi-efektivitas-dan-ekonomi-pemberian-tukin-dosen-asn-untuk-meningkatkan-kualitas-pendidikan-tinggi-di-indonesia

	Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia			
10.	Tunjangan kinerja dosen ASN: Jalan Panjang menuju kesejahteraan tenaga pendidik perguruan tinggi	The Conversation	23 Januari 2025	https://theconversation.com/tunjangan-kinerja-dosen-asn-jalan-panjang-menuju-kesejahteraan-tenaga-pendidik-perguruan-tinggi-247896
11.	Ratusan Dosen ASN Gelar Demo di Depan Istana, Tuntut Pemerintah Segera Bayar Tukin	Tempo	3 Februari 2025	https://www.tempo.co/politik/ratusan-dosen-asn-gelar-demo-di-depan-istana-tuntut-pemerintah-segera-bayar-tukin-1201959
12.	Polemik Tukin Dosen, Legislatur Tegaskan Pentingnya Kesejahteraan Pendidik	Emedia DPR	21 Februari 2025	https://emedia.dpr.go.id/2025/02/21/18endiditukin-dosen-legislatur-tegaskan-pentingnya-kesejahteraan-pendidik/
13.	Diskusi Kebangsaan Tentang Pendidikan, Ibas: Kesejahteraan Dosen Penting, Tukin Mesti Cair Segera	MPR	4 Maret 2025	https://mpr.go.id/berita/Diskusi-Kebangsaan-Tentang-Pendidikan,-Ibas:-Kesejahteraan-Dosen-Penting,-Tukin-Mesti-Cair-Segera
14.	Munas Perdana ADAKSI Digelar 2–4 Mei 2025 di Jakarta, Fokus Bahas Kesejahteraan Dosen ASN	Times Indonesia	24 April 2025	https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/536318/munas-perdana-adaksi-digelar-24-mei-2025-di-jakarta-fokus-bahas-kesejahteraan-dosen-asn

Defined Problem

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 44 Tahun 2024 merupakan tonggak penting dalam reformasi kebijakan penghasilan dosen, yang menetapkan bahwa batas bawah penghasilan dosen setara dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) serta memberikan 18endidik Tunjangan Kinerja (Tukin) berdasarkan capaian kinerja yang terukur. Namun demikian, implementasi regulasi ini masih menunjukkan ketimpangan signifikan, terutama terhadap dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemendikristek).

Selama periode lima tahun terakhir (2020–2024), para dosen ASN di lingkungan ini tidak menerima pencairan tukin secara merata, berbeda dengan dosen ASN di 18endidikan18 atau 18endidid (K/L) lain yang telah memperoleh tunjangan tersebut sejak tahun 2012, khususnya di bawah skema remunerasi nasional.

Kesenjangan ini tidak hanya menciptakan disparitas kesejahteraan, tetapi juga menimbulkan keresahan yang berdampak pada aspek psikologis dan produktivitas kerja dosen. Akumulasi kekecewaan tersebut akhirnya memuncak dalam bentuk protes 18endidid dan aksi demonstrasi besar-besaran yang melibatkan sekitar 300–400 dosen ASN dari berbagai penjurur Indonesia, yang turun langsung ke 18endidid Monas dan Istana Negara pada 3 Februari 2025.

Mereka menuntut keadilan dalam pencairan tunggakan tukin serta jaminan pemenuhan hak 18endididika seluruh dosen ASN, tanpa diskriminasi institusional. Aksi ini menjadi 18endidid perlawanan terhadap ketidakadilan 18endididikan yang selama ini dianggap diabaikan oleh pemangku kebijakan pusat, dan menjadi katalis bagi lahirnya 18endidid kolektif seperti ADAKSI (Aliansi Dosen ASN Kemdikristek Seluruh Indonesia) yang mengadvokasi perlindungan hak-hak dasar profesi akademik secara terorganisir.

Diagnose Cause

Implementasi regulasi yang timpang mencerminkan lemahnya konsistensi antara kebijakan 18endididika dan pelaksanaannya di lapangan. Meskipun Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024 telah memberikan kerangka hukum yang progresif bagi kesejahteraan dosen ASN, kenyataannya tata 18endidid implementasi regulasi tersebut masih belum selaras antarinstansi. Salah satu kendala utama terletak pada tingginya ketergantungan terhadap regulasi lintas 18endididikan18 dan 18endidid. Skema pencairan Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk dosen ASN tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum yang mengikat, disertai dengan proses harmonisasi lebih lanjut bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) serta pengesahan anggaran oleh DPR RI, proses yang hingga kini masih berlangsung tanpa kejelasan waktu. Ketimpangan juga tercermin dalam pengelolaan anggaran yang tidak proporsional.

Alokasi anggaran sebesar Rp 2,5 triliun yang telah dikomunikasikan hanya mampu mencakup sekitar 30.000 dosen dari total lebih dari 80.000 dosen ASN yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ketidakmerataan ini tidak hanya menimbulkan kecemburuan 19endid, tetapi juga mengganggu kepercayaan terhadap mekanisme kebijakan yang seharusnya menjamin keadilan.

Di 19endid lambatnya respons birokrasi dan absennya kanal aspirasi resmi yang efektif, banyak dosen merasa bahwa ruang dialog telah tertutup. Situasi ini mendorong lahirnya gelombang demonstrasi sebagai bentuk ekspresi kolektif terhadap ketidakadilan 19endidikan. Aksi turun ke jalan menjadi satu-satunya saluran yang dirasa didengar oleh pengambil kebijakan, memperlihatkan adanya 19endidi komunikasi dan partisipasi dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan kesejahteraan dosen ASN.

Make Moral Judgement

Kewajiban negara dalam menjamin hak-hak dasar aparatur sipil negara, termasuk dosen, seharusnya menjadi prioritas dalam kerangka tata 19endid pemerintahan yang berkeadilan. Namun, penundaan pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) selama bertahun-tahun secara jelas mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan 19endidikan1919 dan ketidakpatuhan terhadap asas kepastian hukum.

Dosen ASN yang telah melaksanakan tugas tri dharma secara penuh tetap tidak menerima haknya secara layak, padahal mereka memainkan peran krusial dalam menjaga mutu dan daya saing 19endidikan tinggi nasional. Meskipun pemerintah telah menunjukkan adanya 19endi melalui penyusunan regulasi dasar dan alokasi anggaran tertentu, keterlambatan implementasi serta ketidakmerataan realisasi menunjukkan lemahnya manajemen birokrasi, minimnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya sensitivitas terhadap kondisi psikososial para pekerja akademik. Ketidaktepatan respons terhadap krisis kesejahteraan ini secara tidak langsung menggerus kepercayaan dosen terhadap 19endid negara yang seharusnya melindungi dan memberdayakan.

Dalam konteks ini, aksi demonstrasi damai yang dilakukan oleh ratusan dosen ASN di 19endidi Monas dan Istana Negara pada 3 Februari 2025 bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan ekspresi sah dan rasional atas hak konstitusional sebagai warga negara. Tindakan ini mencerminkan etika perlawanan sipil yang bermartabat—tidak anarkis, tidak melawan hukum, namun bersifat proaktif, berlandaskan 19endidik moral, serta bertujuan menuntut pemenuhan hak yang telah lama terabaikan. Dengan demikian, 19endidi ini harus dilihat sebagai 19endi membangun negara hukum yang adil dan demokratis, di mana suara akademisi tidak hanya didengar, tetapi juga dihargai sebagai bagian dari 19endid kebijakan yang sehat.

Treatment Recommendation

Untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan dalam pemenuhan hak-hak dosen ASN, diperlukan transparansi anggaran dan kejelasan kuota pencairan tunjangan kinerja secara tahunan. Alokasi anggaran harus disusun secara proporsional dan terbuka, tanpa mengedepankan skala prioritas yang sepihak yang berpotensi mengabaikan kelompok tertentu, khususnya dosen di bawah Kemendikbudristek.

Langkah konkret yang mendesak adalah merealisasikan pembayaran seluruh tunggakan Tukin periode 2020–2024 sebagai bentuk tanggung jawab negara dan pemulihan hak yang tertunda. Dalam rangka memperkuat mekanisme akuntabilitas dan partisipasi, perlu dibangun jalur komunikasi terpadu yang melibatkan birokrat teknis, 19endidikan19 (DPR), dan perwakilan komunitas dosen melalui forum dialog 19endidi untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan menyepakati tindak lanjutnya. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024 menjadi 19endidi strategis yang tidak bisa diabaikan.

Evaluasi tersebut harus mencakup 19endidika konkret, mulai dari realisasi pencairan Tukin, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi dosen, hingga aspek non-material seperti kondisi 19endidika mental yang sangat dipengaruhi oleh tekanan kerja dan ketidakpastian kebijakan. Dengan demikian, reformasi kebijakan penghasilan dosen tidak berhenti pada regulasi di atas kertas, tetapi menjadi kebijakan hidup yang dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku akademik di seluruh Indonesia.

IV. Kesimpulan

Berbagai sorotan media mengungkapkan masalah 19endidikan dalam skema kesejahteraan dosen ASN yang berdampak serius pada 19endidika mental. Dengan implementasi kebijakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan, pemerintah dapat memulihkan kepercayaan dan menjaga produktivitas akademik dosen. Ketimpangan implementasi kebijakan kesejahteraan dosen ASN

di bawah Kemendikristek menunjukkan adanya kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional terhadap aparturnya. Meskipun Permendikbudristek No.44 Tahun 2024 telah menyediakan kerangka 20endidika yang menjanjikan, lemahnya sinkronisasi antarinstansi, ketergantungan tinggi pada regulasi lintas 20endidikan20, serta pengelolaan anggaran yang tidak proporsional, menyebabkan ketidakadilan dalam pencairan tunjangan kinerja. Akumulasi kekecewaan ini mendorong lahirnya aksi demonstrasi damai oleh ratusan dosen sebagai bentuk ekspresi sah dan rasional terhadap ketidakpekaan birokrasi. Aksi ini bukan sekadar perlawanan, tetapi manifestasi moral dari tuntutan atas keadilan 20endid dan 20endidikan2020. Untuk mengatasi akar masalah ini, diperlukan 20endidi strategis berupa transparansi anggaran dan kuota tahunan yang adil, pembayaran segera atas tunggakan Tukin 2020–2024, 20endidikan20 forum komunikasi terpadu antara pemerintah, 20endidikan20, dan perwakilan dosen, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan. Kesejahteraan dosen tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga menyentuh kualitas 20endidikan tinggi nasional secara keseluruhan. Tanpa komitmen serius dalam menuntaskan persoalan ini, visi Indonesia Emas 2045 dan tujuan SDGs 2030 di bidang 20endidikan akan sulit terwujud secara inklusif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- [1] M. Mawarpury, H. Maulana, M. Khairani, and E. Fourianalistyawati, *Buku Seri Kesehatan Mental Indonesia: Kesehatan Mental di Indonesia Saat Pandemi*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022.
- [2] M. Muhammadiyah, M. B. Tamam, T. Wijanarko, D. Mahendika, I. A. Mas'ud, M. Yufrinalis, and B. Setiadi, "Memberdayakan Pemuda untuk Masa Depan yang Lebih Cerah: Memberikan Pendidikan, Bimbingan, Peluang Kerja, dan Dukungan Kesehatan Mental," *J. Pengabd. West Sci.*, vol. 2, no. 05, pp. 354–363, 2023.
- [3] S. A. Farika, M. N. Mirza, and A. N. Romas, "Promosi Kesehatan tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental pada Remaja," *J. Pengabd. Dan Pemberdayaan Kesehat.*, vol. 1, no. 1, pp. 69–77, 2024.
- [4] Y. S. Pongtambing, "Konsistensi Internal dan Validasi Kriteria pada Alat Ukur Kesehatan Mental Mahasiswa Universitas Hasanuddin," *Gajah Mada J. Psychol. (GamaJoP)*, vol. 6, no. 2, 2020.
- [5] P. A. F. B. S. Meliala, "Kesehatan Mental Mahasiswa Menghadapi Tekanan Akademik Dan Sosial," *Circle Arch.*, vol. 1, no. 4, 2024.
- [6] A. Rosmalina, "Pengaruh kesehatan mental terhadap kesejahteraan keluarga," *Prophetic: Prof. Empathy Islam. Couns. J.*, vol. 5, no. 2, pp. 171–182, 2022.
- [7] S. Yuliawati, "Kajian implementasi tri dharma perguruan tinggi sebagai fenomena pendidikan tinggi di Indonesia," *J. Ilmiah Widya*, no. 218712, 2012, Kopertis Wilayah III.
- [8] E. M. Pertiwi, H. M. Denny, and B. Widjasena, "Hubungan antara beban kerja mental dengan stres kerja dosen di suatu fakultas," *J. Kesehat. Masyarakat*, vol. 5, no. 3, pp. 260–268, 2017, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
- [9] Y. S. Pongtambing, H. Admawati, A. Anggraini, Q. Andayani, S. Delyarahmi, N. H. Putra, E. S. Manapa, and A. Novitasari, "Kelas Motivasi untuk Menghadapi Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Dosen Tahun 2023," *J. Informasi Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 4, pp. 271–280, 2023.
- [10] Y. S. Pongtambing and E. S. Manapa, "ADAKSI sebagai Gerakan Kesejahteraan Dosen ASN Indonesia: Narrative Inquiry," *Intellektika: J. Ilmiah Mahasiswa*, vol. 3, no. 3, pp. 26–36, 2025.
- [11] E. A. M. Sampetoding, H. Admawati, Y. S. Pongtambing, J. Tampubolon, and E. S. Manapa, "Musyawarah Nasional Kesatu ADAKSI sebagai Upaya Strategis Peningkatan Kesejahteraan dan Profesionalisme Dosen ASN," *Karya Nyata: J. Pengabdian kpd. Masyarakat*, vol. 2, no. 2, pp. 113–122, 2025.
- [12] T. A. Suparto and A. P. W. Puspita, "Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kesehatan Mental Emosional pada Dosen Perguruan Tinggi Pasca Pandemi Covid-19," *J. Keperawatan Komplementer Holistic*, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2024.
- [13] R. Ridwan, S. Suwarsi, and I. F. Alamsyah, "Pengaruh Beban Kerja terhadap Kesehatan Mental Dampaknya pada Produktivitas Dosen (Studi pada Universitas Islam Bandung)," in *Bandung Conf. Ser.: Business and Management*, vol. 4, no. 1, 2024.
- [14] D. Mulyana et al., *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2002.
- [15] M. N. Hafidli, R. N. D. L. Sasmita, L. Nurazhari, and N. R. G. Putri, "Analisis framing model Robert Entman tentang kasus Kanjuruhan di detikcom dan BBC News," *J. Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 1, pp. 178–183, 2023.